

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
<i>ABSTRACT</i> .....	ii
ABSTRAK .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....	vi
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	10
A. Landasan Teori.....	10
1. Teori Keagenan ( <i>Agency Theory</i> ).....	10
2. Definisi Manajemen Laba .....	12
a. Pola-pola Manajemen Laba.....	14
b. <i>Income Smoothing</i> .....	15
3. Sejarah Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.....	18
4. Konvergensi IFRS .....	20
5. Kualitas Audit.....	23
B. Penelitian Terdahulu .....	26

C. Kerangka Berfikir .....	28
D. Perumusan Hipotesis.....	30
1. Pengaruh konvergensi IFRS terhadap <i>income smoothing</i> .....	30
2. Pengaruh kualitas audit terhadap <i>income smoothing</i> .....	32
BAB III METODE PENELITIAN .....	35
A. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel .....	35
1. Variabel Dependen.....	35
2. Variabel Independen .....	36
B. Populasi dan Sampel Penelitian.....	39
1. Populasi Penelitian.....	39
2. Jenis Sumber Data .....	39
3. Metode Pengumpulan Data.....	40
4. Metode Analisis Data.....	40
a. Statistik Deskriptif.....	40
b. Uji Regresi Logistik.....	41
5. Pengujian Hipotesis .....	41
a. Uji <i>Hosmer and Lemeshow's</i> .....	41
b. Uji -2 <i>Likelihood</i> .....	41
c. <i>Negelkerke's Square dan Cox Snell's Square</i> .....	43
d. Estimasi dan Interpretasi .....	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.....	44
A. Deskripsi Objek Penelitian .....	44
B. Analisis Data.....	44
C. Pengujian Hipotesis .....	46
1. Uji <i>Hosmer and Lemeshow's</i> .....	46
2. Uji -2 <i>Likelihood</i> .....	47
3. <i>Negelkerke's R Square and Cox Snell's R Square</i> .....	48
4. Estimasi dan Interpretasi .....	50
D. Interpretasi Hasil .....	51
1. Hipotesis 1 .....	51

2. Hipotesis 2 .....	52
BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN .....	54
A. Simpulan.....	54
B. Keterbatasan Penelitian .....	55
C. Saran .....	55
DAFTAR PUSTAKA .....	57

## DAFTAR TABEL

Tabel 1: <i>Descriptive Statistics</i> .....	45
Tabel 2: <i>Hosmer and Lemeshow Test</i> .....	46
Tabel 3: <i>Variables in Equation</i> .....	47
Tabel 4: <i>Model Summary</i> .....	49

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Kerangka Pemikiran.....	29
-----------------------------------	----

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Data Penelitian.....	61
Lampiran 2: <i>Descriptive Statistics</i> .....	68
Lampiran 3: Output SPSS .....	69

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan yang dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan oleh para *stakeholder* perusahaan. Peran akuntansi keuangan dalam era globalisasi sebagai sumber informasi keuangan secara geografis makin meluas dan melampaui batas wilayah Negara. Ruang lingkup pengguna laporan keuangan telah meluas secara global sejalan dengan arus dana, barang, jasa dan tenaga. Laporan keuangan suatu perusahaan tidak saja harus dapat digunakan, diperbandingkan, dan dimengerti di suatu wilayah atau suatu Negara, tetapi juga oleh *stakeholders* global. Standar Akuntansi Keuangan yang semula bersifat nasional, telah dituntut untuk bersifat internasional (Kartikahadi, 2012).

Harmonisasi standar akuntansi dan pelaporan keuangan telah dianggap sebagai suatu hal yang mendesak yang harus dilakukan, dengan tujuan adanya pemahaman yang lebih baik atas laporan keuangan oleh pengguna laporan keuangan yang berasal dari berbagai negara. Harmonisasi standar akuntansi akan memudahkan suatu perusahaan menjual sahamnya secara lintas Negara ataupun lintas pasar modal (Purba, 2009).

IFRS (*International Financial Reporting Standards*) telah diterapkan oleh sejumlah Negara di dunia, dengan tingkat adopsi yang berbeda-beda. IFRS pertama kali diterapkan secara penuh oleh negara-negara Uni Eropa yang

kemudian disusul Australia, Brazil, Kanada, Singapura dan beberapa Negara di dunia termasuk Indonesia. IASB (*International Accounting standart Board*) mengeluarkan IFRS sebagai standar akuntansi dan pelaporan keuangan baru yang diberlakukan disamping IAS (*International Accounting Standards*) yang sudah ada dengan tujuan mengembangkan standar tunggal pelaporan keuangan di berbagai jenis entitas yang dapat diterima secara global, memiliki kekuatan dalam penerapan standar akuntansi yang dapat dipahami dan berkualitas tinggi (Wasono, 2011).

IFRS menggabungkan dan memperluas sejumlah persyaratan pengungkapan yang telah ada sebelumnya, dan menambahkan beberapa pengungkapan baru diantaranya PSAK No 60 yang berisi pengungkapan-pengungkapan atas resiko-resiko, manajemen resiko dan mensyaratkan entitas pelaporan untuk melaporkan sensitivitas instrumen keuangannya terhadap pergerakan resiko-resiko tersebut. Pengungkapan kualitatif dan kuantitatif atas dampak dari resiko-resiko, antara lain resiko pasar, resiko kredit dan risiko likuiditas, penambahan pengungkapan untuk item-item yang mempengaruhi jumlah laba komprehensif, dimana keuntungan dan kerugian dipisahkan berdasarkan kategori instrumen keuangan, dan pengungkapan nilai wajar untuk setiap kelas aset dan liabilitas keuangan, serta pengungkapan hirarki nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diukur dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan. Pengungkapan dalam laporan keuangan harus sejalan dengan data atau informasi yang dipakai untuk pengambilan keputusan yang diambil oleh manajemen. Tingkat pengungkapan yang mendekati pengungkapan penuh (*full*

*disclosure*) akan mengurangi tingkat asimetri informasi atau keseimbangan informasi antara manajer dengan pihak pengguna laporan, adanya asimetri informasi mendorong manajer akan melakukan *dysfunctional behavior* dengan manajemen laba. Beberapa penelitian membuktikan bahwa keberadaan asimetri informasi antara manajer dan pemegang saham adalah kondisi yang diperlukan untuk melakukan manajemen laba (Dye, dalam Rusmin 2010).

*Income smoothing* merupakan bagian dari manajemen laba yang merupakan intervensi dari pihak manajemen untuk mengatur laba yaitu dengan meratakan laba akuntansi dengan memanfaatkan atau kelonggaran penggunaan metode dan prosedur akuntansi. Standar akuntansi memperbolehkan untuk memilih metode akuntansi (Cahyati, 2011). Scott (1997) dalam Lestari (2013) menyatakan bahwa manajemen laba adalah cara yang digunakan oleh manajer untuk mempengaruhi angka laba secara sistematis dan sengaja memilih kebijakan akuntansi dan prosedur akuntansi tertentu yang bertujuan untuk memaksimalkan utilitas manajer dan atau nilai pasar dari perusahaan.

Isu *income smoothing* telah banyak dibicarakan baik dalam teori maupun dalam penelitian. Menurut (Belkaoui, 2007), *income smoothing* didorong oleh keinginan untuk mempertinggi keandalan prediksi yang didasarkan pada laba dan untuk mengurangi risiko yang mengitari angka-angka akuntansi. Tindakan manajemen yaitu dengan cara melakukan *income smoothing* umumnya didasarkan atas berbagai alasan, antara lain untuk memuaskan kepentingan pemilik perusahaan, seperti menaikkan nilai perusahaan, sehingga muncul anggapan bahwa perusahaan yang bersangkutan

memiliki risiko yang rendah. Alasan lainnya adalah untuk memuaskan kepentingan manajemen, seperti mendapatkan kompensasi dan mempertahankan posisi jabatannya (Juniarti dan Corolina, 2005).

Penelitian yang dilakukan (Rohaeni dan Aryati, 2011) di negara Singapura, Cina dan Indonesia pada sektor manufaktur terbukti dengan konvergensi IFRS berpengaruh negatif terhadap tindakan *income smoothing*. Hubungan negatif ini terjadi karena penerapan IFRS akan berdampak pada semakin sedikitnya pilihan metode-metode akuntansi yang dapat diterapkan sehingga akan meminimalisir praktik kecurangan akuntansi. Argumentasi Ashbaugh dan Pincus (2001) dan Barth *et.al.*(2007) dalam Wardhani (2009) menyatakan bahwa dengan semakin konvergennya GAAP (*Generally Accepted Accounting Principles*) lokal suatu negara terhadap standar akuntansi internasional maka persyaratan pengungkapannya akan lebih banyak dan pilihan metode akuntansinya lebih terbatas sehingga kualitas akuntansi dapat diperbaiki. Perbaikan dapat dilakukan dengan menghilangkan alternatif-alternatif metode akuntansi yang kurang dapat merefleksikan kinerja perusahaan yang dapat digunakan untuk pengelolaan laba.

Berbeda dengan hasil penelitian Shanty (2012) meneliti sektor perbankan yang sudah *go public* dan terdaftar di BEI dari tahun 2008-2011 sebanyak 31 perusahaan bahwa adopsi IFRS tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Temuan ini disimpulkan bahwa penyesuaian standar akuntansi dengan mengadopsi IFRS khususnya pada PSAK No 50 (revisi

2006) dan PSAK No 55 (revisi 2006) belum menjamin adanya penurunan manajemen laba.

Kualitas laba juga akan dipengaruhi oleh pihak independen yang ikut dalam proses pelaporan keuangan perusahaan, yaitu auditor. Peran auditing dalam proses pelaporan keuangan adalah untuk mendorong aplikasi standar akuntansi. Peran auditor independen adalah untuk menyediakan jasa verifikasi oleh pihak luar atas kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku, meskipun merupakan entitas yang terpisah dari perusahaan, namun penunjukkan auditor tetap berada di tangan manajemen. Manajemen tetap memiliki kendali terhadap auditor yang akan ditunjuk untuk melakukan audit atas laporan keuangan perusahaan. Auditor merupakan pihak di luar entitas perusahaan, namun karena kualitas audit dipengaruhi oleh auditor yang ditunjuk oleh manajemen, maka manajemen akan tetap memiliki kendali atas kualitas audit tersebut (Wardhani, 2009).

De Angelo (1981) dalam Wardhani (2009) mendefinisikan kualitas audit sebagai penilaian pasar terhadap kemungkinan auditor akan menemukan suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi klien dan melaporkan pelanggaran tersebut. De Angelo (1981) dalam Wardhani (2009) mengemukakan bahwa kualitas audit meningkat dengan ukuran KAP karena KAP besar mempunyai kemampuan lebih untuk berspesialisasi dan berinovasi melalui teknologi. KAP besar lebih mampu untuk menemukan pelanggaran dalam sistem akuntansi perusahaan dibandingkan dengan KAP kecil. Sumberdaya dan keunggulan

komparatif yang dimiliki oleh auditor besar, dalam deteksi dan koreksi kesalahan pelaporan keuangan perusahaan dapat dilakukan dengan lebih baik.

Pengaruh kualitas audit terhadap kualitas laba telah didokumentasikan oleh beberapa penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian sebelumnya menyatakan bahwa perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan publik yang besar memiliki kualitas laba yang lebih baik (Becker *et.al.*, 1998; Teoh dan Wong, 1993) dalam Wardhani (2009). De Angelo (1981) dalam Samekto (2013) berargumentasi bahwa kualitas audit secara langsung berhubungan dengan ukuran dari perusahaan audit, proksi untuk ukuran perusahaan audit adalah jumlah klien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan audit yang besar akan berusaha untuk menyajikan kualitas audit yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan audit yang kecil. Perusahaan audit yang besar, jika tidak memberikan kualitas audit yang tinggi akan kehilangan reputasinya, dan jika ini terjadi maka dia akan mengalami kerugian yang lebih besar dengan kehilangan klien.

Penelitian dilakukan Pradhana (2013) meneliti pengaruh kualitas audit terhadap *earnings management* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar dan *listing* di BEI periode 2008-2010. Hasil penelitian membuktikan bahwa pengaruh antara ukuran auditor dengan terjadinya *earnings managements* adalah *negative* tidak signifikan.

Penelitian lainnya yang dilakukan Masrurroh (2010) untuk mengetahui pengaruh mekanisme *corporate governance* (yang terdiri dari kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi komisaris

independen, *remuneration* dan keberadaan komite audit) dan kualitas audit terhadap *income smoothing*. Hasil pengujian dengan menggunakan regresi logistik menunjukkan kepemilikan manajerial, proporsi komisaris independen dan kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *income smoothing*, sedangkan variabel kepemilikan institusional, *remuneration*, keberadaan komite audit, ukuran perusahaan, dan rasio profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *income smoothing*.

Dari beberapa penelitian terdahulu memotivasi peneliti untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh konvergensi IFRS dan kualitas audit terhadap *income smoothing*. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Rohaeni dan Aryati (2011) yang berjudul pengaruh konvergensi IFRS terhadap *income smoothing* dengan kualitas audit sebagai variabel moderasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada 1) objek penelitian, yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan manufaktur dipilih untuk mencegah terjadinya bias dalam perhitungan *income smoothing*. 2) Perubahan variabel moderasi (kualitas audit diproksikan dengan KAP *big four*) menjadi variabel independen yang terdiri dari struktur kualitas audit yang diproksikan dengan ukuran KAP *big four*. 3) Tahun penelitian, yaitu tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. tahun 2008 merupakan tahap pengadopsian IFRS dan tahun 2010 merupakan tahap implementasi IFRS di Indonesia (IAI).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penelitian ini diberi judul “**Pengaruh Konvergensi IFRS dan Kualitas Audit terhadap *Income Smoothing***”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah konvergensi IFRS berpengaruh terhadap *income smoothing*?
2. Apakah kualitas audit dengan ukuran KAP *big four* berpengaruh terhadap *income smoothing*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan masalah penelitian yang muncul maka penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh konvergensi IFRS terhadap *income smoothing*.
2. Pengaruh kualitas audit dengan ukuran KAP *big four* terhadap *income smoothing*.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Bagi ilmu pengetahuan diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi untuk memahami pengaruh konvergensi IFRS dan kualitas audit terhadap *income smoothing*.

2. Bagi Regulator

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi regulator dalam proses penyesuaian kebijakan yang terkait dengan konvergensi IFRS, serta

dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya konvergensi IFRS yang berpengaruh terhadap *income smoothing* dan kualitas audit terhadap kualitas laporan keuangan.

### 3. Bagi Praktisi Keuangan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat melalui peningkatan wawasan hubungan konvergensi IFRS, kualitas audit dan *income smoothing*. Akuntan maupun auditor dapat melaporkan laporan keuangan dengan kualitas yang lebih baik dan para pemegang saham (pemilik) dan investor dapat menggunakan laporan keuangan tersebut dalam pengambilan keputusan secara lebih bijaksana.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Laporan keuangan yang disusun oleh manajemen suatu entitas usaha ditujukan untuk dilaporkan dan digunakan oleh para *stakeholders* untuk pengambilan keputusan. Semakin berkembangnya sebuah perusahaan, pemisahan antara pemilik perusahaan dan manajemen merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan. Pemisahan antara pemilik sebagai prinsipal dan manajer sebagai agen yang menjalankan perusahaan akan memunculkan permasalahan agensi karena masing-masing pihak akan selalu berusaha untuk memaksimalkan fungsi utilitas yang dimilikinya.

Jensen & Meckling (1976) dalam Wardhani (2009) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai kontrak dimana satu orang atau lebih yang bertindak sebagai prinsipal (pemegang saham/*shareholder*) menunjuk orang lain sebagai agen (manajer) untuk melakukan jasa bagi kepentingan prinsipal, termasuk mendelegasikan kekuasaan dalam pengambilan keputusan kepada agen. Hubungan keagenan tersebut akan menimbulkan konflik apabila manajer berusaha untuk memaksimalkan utilitas pribadinya dengan mengorbankan kesejahteraan pemilik.

Biaya keagenan merupakan pengorbanan yang timbul dari hubungan keagenan, termasuk hubungan dalam kontrak kerja antara manajer dan pemilik perusahaan, oleh sebab itu setiap pihak akan menanggung biaya keagenan

(*agency cost*) Sulistyanto (2008). Jensen dan Meckling (1976) dalam Putri (2013) mengidentifikasi biaya keagenan menjadi tiga kelompok, yaitu: 1) *the monitoring expenditure by principal* adalah biaya pengawasan yang harus dikeluarkan oleh pemilik, 2) *the bonding cost* adalah biaya yang harus dikeluarkan akibat pemantauan yang harus dikeluarkan prinsipal kepada agen, 3) *the residual cost* adalah pengorbanan akibat berkurangnya kemakmuran prinsipal karena perbedaan keputusan antara prinsipal dan agen. Manajemen akan berusaha meminimalkan biaya keagenan (*agency cost*) dengan sukarela memberi informasi keuangan kepada pemilik, sedangkan pemilik akan mengeluarkan biaya monitoring untuk mengawasi kinerja manajemen. Pemilik mengharapkan *return* yang tinggi dari investasi yang mereka tanamkan pada perusahaan, sedangkan manajemen mengharapkan kompensasi yang tinggi dan dipenuhinya kebutuhan psikologis mereka.

Hal ini menyebabkan timbul konflik antara manajemen dengan pemilik karena masing-masing akan memenuhi kepentingannya sendiri. Keadaan tersebut merupakan dasar dari teori agensi dalam penelitian ini, adanya perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal untuk memaksimalkan kesejahteraannya masing-masing. Kondisi ini disebabkan karena adanya asimetri informasi antara agen dan prinsipal. Tingkat pengungkapan yang mendekati pengungkapan penuh (*full disclosure*) akan mengurangi tingkat asimetri informasi atau keseimbangan informasi antara manajer dengan pihak pengguna laporan. Adanya asimetri informasi mendorong manajer akan melakukan *dysfunctional behavior* dengan

manajemen laba. Terutama jika terkait dengan pengukuran kinerja manajer. Beberapa penelitian membuktikan bahwa keberadaan asimetri informasi antara manajer dan pemegang saham adalah kondisi yang diperlukan untuk melakukan manajemen laba (Dye, dalam Rusmin 2010).

Asimetri informasi (*information asymmetry*) yaitu suatu kondisi di mana ada ketidakseimbangan perolehan informasi antara pihak manajemen dan pemegang saham. Manajer memiliki informasi yang lebih banyak (*full information*) dibanding dengan pemegang saham karena sebagai pengelola, manajer lebih mengetahui keadaan yang ada dalam perusahaan. Informasi yang lebih sedikit yang dimiliki oleh pemegang saham dapat memicu manajer menggunakan posisinya dalam perusahaan untuk mengelola laba yang dilaporkan (Lobo dan Zhou dalam Rusmin, 2010).

Kondisi ini menyebabkan munculnya konflik kepentingan antara pemegang saham (prinsipal) dengan manajer (agen). Agen dan prinsipal ingin memaksimalkan kesejahteraan masing-masing dengan informasi yang dimiliki. Untuk meminimalisasi adanya asimetri informasi diperlukan adanya pihak ketiga yang independen sebagai mediator hubungan antara prinsipal dan agen. Pihak ketiga ini berfungsi untuk memonitor perilaku manajer agar bertindak sesuai dengan keinginan prinsipal.

## **2. Definisi Manajemen Laba**

Tindakan *income smoothing* terkait erat dengan konsep manajemen laba (Salno, 1999). Manajemen laba juga dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan dengan sengaja, dalam batasan *generally accepted accounting*

*principles*, untuk mengarah pada suatu tingkat yang diinginkan atas laba yang dilaporkan. *Income smoothing* dapat dipandang sebagai cara pengurangan dalam variabilitas laba selama periode tertentu atau dalam satu periode, yang mengarah pada tingkat yang diharapkan atas laba yang dilaporkan (Assih, 2000). Manajemen laba merupakan upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui *stakeholder* yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan (Sulistyanto, 2008). Schipper (1989) dalam Rohaeni dan Aryati (2011) mengungkapkan bahwa manajemen laba sebagai suatu intervensi yang memiliki tujuan tertentu dalam proses pelaporan keuangan eksternal demi keuntungan pribadi. Manajemen laba akan mengakibatkan laba tidak sesuai dengan realitas ekonomi yang ada sehingga kualitas laba yang dilaporkan menjadi rendah. Laba yang disajikan tidak mencerminkan realitas ekonomi, tetapi lebih karena keinginan manajemen untuk memperlihatkan sedemikian rupa sehingga kinerjanya dapat terlihat baik.

Secara umum manajemen laba didefinisikan sebagai upaya campur tangan dalam penyusunan laporan keuangan (Schipper, 1989) kesalahan atau kelalaian yang disengaja dalam membuat laporan keuangan (*National Association of Fraud Examiners*) serta menggunakan keputusan tertentu untuk mengubah laporan keuangan (Healy dan Wahlen, 1998) dari definisi tersebut menyepakati bahwa manajemen laba merupakan aktivitas manajerial untuk mempengaruhi dan mengintervensi laporan keuangan (Sulistyanto, 2008).

### a. Pola-Pola Manajemen Laba

Menurut Scott 2000 dalam (Rohaeni dan Aryati, 2011) terdapat empat pola manajemen laba, yaitu:

#### 1. *Taking a bath*

Pola ini terjadi pada saat pengangkatan CEO baru dengan cara melaporkan kerugian dalam jumlah besar yang diharapkan dapat meningkatkan laba di masa yang akan datang yang dilakukan dengan cara menjadikan laba perusahaan pada periode berjalan menjadi sangat ekstrim rendah (bahkan rugi) atau sangat ekstrim tinggi dibandingkan dengan laba pada periode sebelumnya atau sesudahnya.

#### 2. *Income minimization*

Pola ini dilakukan pada saat perusahaan memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi sehingga jika laba pada masa mendatang diperkirakan turun drastis dapat diatasi dengan mengambil laba periode sebelumnya.

#### 3. *Income maximization*

Dilakukan pada saat laba menurun bertujuan untuk melaporkan *net income* yang tinggi untuk tujuan bonus yang lebih besar. Pola ini dilakukan oleh perusahaan yang melakukan pelanggaran perjanjian hutang.

#### 4. *Income Smoothing*

Dilakukan perusahaan dengan cara meratakan laba yang dilaporkan sehingga dapat mengurangi fluktuasi laba yang terlalu besar karena pada umumnya investor lebih menyukai laba yang relatif stabil.

### **b. *Income Smoothing***

Seperti diuraikan di atas, salah satu bentuk manajemen laba adalah *income smoothing*. Perataan laba (*income smoothing*) merupakan salah satu pola dari manajemen laba (Cahan, 2008). Penjelasan konsep manajemen laba menggunakan teori keagenan. Teori keagenan menyatakan bahwa praktik manajemen laba dipengaruhi oleh konflik kepentingan antara manajemen (*agent*) dan pemilik (*principal*) yang timbul karena adanya keinginan untuk memaksimalkan kemakmuran masing-masing. Pilihan atas suatu kebijakan akuntansi oleh beberapa kelompok tersebut bergantung pada perbandingan relatif biaya dan manfaat dari prosedur-prosedur akuntansi alternatif (Belkaoui, 2007). Sejalan dengan konsep manajemen laba, konsep *Income smoothing* juga menggunakan teori keagenan.

Foster (1986) dalam Widaryanti (2009) mengklasifikasikan unsur-unsur laporan keuangan yang seringkali dijadikan sasaran untuk melakukan *income smoothing* adalah:

#### **1). Unsur penjualan**

- a. Pembuatan faktur penjualan, sebagai contoh penjualan yang sebenarnya untuk periode yang akan datang pembuatan fakturnya dilakukan pada periode saat ini dan dilaporkan sebagai penjualan periode saat ini.
- b. Pembuatan pesanan atau penjualan fiktif.
- c. Penurunan produk (*down grading*), sebagai contoh dengan cara mengklasifikasikan produk yang belum rusak ke dalam kelompok

produk rusak dan selanjutnya dilaporkan telah terjual dengan harga yang lebih rendah dari harga yang sebenarnya.

## 2). Unsur biaya

- a. Memecah-mecah (*splitting*) faktur, misalnya faktur untuk sebuah pembelian atau pesanan dipecah menjadi beberapa pembelian atau pesanan dan selanjutnya dibuatkan beberapa faktur dengan tanggal yang berbeda kemudian dilaporkan dalam beberapa periode akuntansi.
- b. Mencatat biaya dibayar dimuka (*prepayment*) sebagai biaya, misalnya melaporkan biaya *advertensi* dibayar dimuka untuk tahun depan sebagai biaya *advertensi* tahun ini.

Beidlemen (1973) percaya bahwa manajemen melakukan *Income smoothing* untuk menciptakan suatu aliran kas yang stabil dan mengurangi *covariance* atas return dengan pasar. Barnea *et.al* (1976) menyatakan bahwa manajer melakukan *income smoothing* untuk mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan untuk meningkatkan kemampuan investor untuk memprediksi aliran kas di masa yang akan datang.

Secara spesifik untuk mendeteksi *income smoothing* dimulai dengan menentukan status perusahaan yang melakukan *income smoothing* dan tidak melakukan *income smoothing* diuji dengan menggunakan indeks *Eckel* (1981) dalam Idris (2014). Indeks ini menggunakan *Coefficient Variation (CV)* laba dan penjualan.

Berdasarkan penelitian Eckel (1981) dalam Idris (2014) terdapat dua jenis *Income smoothing* yaitu *naturally smooth* dan *intentionally smooth*. *Intentionally smooth* terbagi atas *artificial smoothing* dan *real smoothing*. *Naturally smooth* (perataan secara alami), perataan ini mempunyai implikasi bahwa sifat proses perataan laba itu sendiri menghasilkan suatu aliran laba yang rata. Hal ini dapat kita dapati pada perolehan penghasilan dari keperluan/pelayanan umum, dimana aliran laba yang ada akan rata dengan sendirinya tanpa ada campur tangan dari pihak lain.

*Intentionally Being Smoothed by Management* (Perataan yang disengaja) dikenal juga dengan *designed smoothing*, perataan ini berbeda dengan *naturally smoothing* yang terjadi secara alami. *Designed smoothing* perataan yang terjadi diakibatkan adanya intervensi atau campur tangan dari pihak lain, dalam hal ini adalah manajemen. *Designed smoothing* dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu: *Artificial smoothing (accounting smoothing)* dan *Real smoothing (transactional atau economic smoothing)*. *Real smoothing* adalah *income smoothing* yang dilakukan melalui transaksi keuangan sesungguhnya dengan mempengaruhi laba melalui perubahan dengan sengaja atas kebijakan operasi dan waktunya.

Sedangkan *artificial smoothing* atau sering juga disebut sebagai *accounting smoothing* adalah *income smoothing* melalui prosedur akuntansi yang ditetapkan untuk memindahkan biaya (*cost*) dan atau pendapatan (*revenue*) dari suatu periode ke periode yang lain.

### 3. Sejarah Standar Akuntansi Keuangan Indonesia

Penyusunan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia dilakukan oleh organisasi profesi. Sejak 1973 sampai sekarang Ikatan Akuntan Indonesia adalah organisasi profesi yang dipercayakan dan diberikan wewenang untuk menyusun Standar Akuntansi Keuangan. Sejak 1973 sampai dengan 1994 pelaksanaan amanah tersebut dilakukan oleh Komite Prinsip Akuntansi Indonesia, dan sejak 1994 sampai sekarang tugas tersebut dilakukan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK). Keanggotaan DSAK terdiri atas anggota IAI dengan berbagai latar belakang bidang kegiatan: Akuntan Publik, Akademisi, Akuntan manajemen dan perwakilan dari Bank Indonesia, perwakilan dari Bapepam LK, perwakilan Direktorat Jendral Pajak, perwakilan Auditor intern pemerintah (BPKP).

Standar akuntansi dalam perkembangannya yang awalnya *single standard* telah berubah menjadi *triple standard*, yaitu: pertama, standar akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik yang digunakan untuk perusahaan kecil dan menengah atau perusahaan yang tidak memiliki akuntabilitas publik dan tidak memiliki fungsi fiducia, atau perusahaan yang mempunyai fungsi fiducia tetapi diwajibkan oleh regulator menggunakan standar SAK ETAP contohnya BPR. Kedua, Standar Akuntansi Syariah, yang digunakan oleh entitas yang melakukan transaksi berbasis syariah. Ketiga adalah standar akuntansi berbasis IFRS yang digunakan untuk entitas yang mempunyai fungsi fiducia dan mempunyai pertanggungjawaban publik (Kartikahadi, 2012).

Peran akuntansi keuangan dalam era globalisasi sebagai sumber informasi keuangan secara geografis makin meluas dan melampaui batas wilayah Negara. Ruang lingkup pengguna laporan keuangan telah meluas secara global sejalan dengan arus dana, barang, jasa, dan tenaga. Laporan keuangan suatu perusahaan tidak saja harus dapat digunakan, diperbandingkan dan dimengerti di suatu wilayah atau suatu Negara, tetapi juga oleh *stakeholders* global. Standar akuntansi keuangan yang semula bersifat nasional, telah dituntut untuk bersifat internasional. Menanggapi kebutuhan laporan keuangan yang bersifat global, pada tahun 1973 atas inisiatif Inggris dan Amerika Serikat dan kemudian diikuti oleh Kanada, Australia, Jepang, Prancis, Jerman, Belanda, dan Selandia Baru telah didirikan *International Accounting Standards Committee* (IASC) yang bermarkas di London.

IASC bertujuan untuk menghasilkan *International accounting standards* (IAS) yang diharapkan dapat dijadikan pegangan dalam penyusunan laporan keuangan yang berskala global. Menyusul terbentuknya *International Federation of Accountants* (IFAC) pada tahun 1977, telah dibuat kesepakatan bahwa seluruh anggota IFAC merupakan anggota IASC. Menyusul kemudian pada Juni 2005 Uni Eropa mengadopsi IAS/IFRS (*International Financial Reporting Standards*), dan mewajibkan pada tahun 2005 semua perusahaan yang terdaftar di bursa efek Eropa (kurang lebih 7.000 perusahaan) menyusun laporan keuangan harus berdasarkan IAS/IFRS. Australia, Selandia Baru, Rusia, dan Afrika Selatan juga telah menerima IFRS. Kanada Mulai mengadopsi IAS/IFRS mulai 2011.

Karena US-GAAP (*Generalized Accepted Accounting Principles*) jauh lebih komprehensif dan kompleks, Amerika Serikat adalah yang paling sulit menerima IAS/IFRS, akan tetapi atas desakan permintaan pasar dan menghadapi tuntutan globalisasi, pada tahun 2002 telah diadakan *Norwalk Agreement* antara FASB (*Financial Accounting Standards Board*) Amerika Serikat dengan IASB (*International Accounting Standards Board*) untuk mengadakan konvergensi antara kedua perangkat standar akuntansi. Sejak saat itu terjadi beberapa revisi pada US-GAAP dan IFRS. Jepang yang semula agak lamban dalam pengembangan standar akuntansi keuangan juga telah mulai sadar pentingnya konvergensi terhadap IAS/IFRS, akhirnya perkembangan IFRS menjadi penting karena empat adi kuasa ekonomi dunia, Amerika Serikat, Uni Eropa, Cina dan Jepang semua secara nyata mendukung program konvergensi IAS/IFRS (Kartikahadi, 2012).

#### **4. Konvergensi IFRS**

Standar Akuntansi Internasional atau IFRS sebelumnya bernama *International Accounting Standards* (IAS). IAS disusun oleh IASC (*International Accounting Standards Committee*) organisasi pendahulu dari IASB. IASC didirikan di London, Inggris pada Juni 1973. Konvergensi IFRS merupakan salah satu kesepakatan pemerintah Indonesia sebagai anggota G20 forum. Sasaran konvergensi tersebut adalah merevisi PSAK agar secara material sesuai dengan IFRS versi 1 Januari 2009, dengan target pencapaian tahun 2012. Pada tahun 2012 seluruh standar yang dikeluarkan oleh DSAK-IAI akan mengacu pada IFRS dan diterapkan oleh Entitas (Kartikahadi, 2012).

IFRS telah diterapkan oleh sejumlah negara di dunia, dengan tingkat adopsi yang berbeda-beda. Adopsi IFRS dapat dilakukan dalam lima tingkatan. Pertama, *full adoption*, dimana suatu Negara mengadopsi seluruh produk IFRS dan menerjemahkannya secara *word by word*. Kedua *adapted*, dimana suatu Negara mengadopsi seluruh IFRS tetapi disesuaikan dengan kondisi suatu Negara. Ketiga, *piecemeal*, dimana suatu Negara mengadopsi sebagian nomor IFRS yaitu nomor standar tertentu dan memilih paragraf tertentu saja. Keempat, *referenced*, dimana suatu Negara menjadikan IFRS sebagai referensi dalam pembentukan standar yang dibuat sendiri oleh badan pembuat standar. Kelima, *not adoption at all*, dimana suatu Negara sama sekali tidak mengadopsi IFRS, Media Akuntansi (2005), dalam Panggabean (2007) dalam (Wardhani, 2009).

Konvergensi IFRS sendiri dapat diartikan membuat standar akuntansi suatu Negara sama dengan IFRS (Kartikahadi, 2012). Konvergensi Standar Akuntansi dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu: adopsi (mengambil langsung dari IFRS) dan harmonisasi secara sederhana dapat diartikan bahwa suatu negara tidak mengikuti sepenuhnya standar yang berlaku secara internasional, Negara tersebut hanya membuat agar standar akuntansi yang mereka miliki tidak bertentangan dengan standar akuntansi internasional. Mengingat standar akuntansi tidak terlepas dari tata hukum, sosial, ekonomi, dan budaya suatu negara, maka pengertian konvergensi ke IFRS lebih masuk akal untuk harmonisasi (Kartikahadi, 2012). Konvergensi standar akan menghapus perbedaan tersebut perlahan-lahan dan bertahap sehingga nantinya tidak akan

ada lagi perbedaan antara standar negara tersebut dengan standar yang berlaku secara internasional. Manfaat konvergensi IFRS (Wasono, 2011) antara lain:

- a. Memudahkan pemahaman atas laporan keuangan dengan penggunaan Standar Akuntansi Keuangan yang dikenal secara internasional (*enhance comparability*).
- b. Meningkatkan arus investasi global melalui transparansi.
- c. Menurunkan biaya modal dengan membuka peluang *Fund raising* melalui pasar modal secara global.
- d. Menciptakan efisiensi penyusunan laporan keuangan.

Konvergensi IFRS membawa perubahan yang signifikan terhadap sistem akuntansi dan pelaporan menurut (Kartikahadi, 2012) antara lain:

- a. Penggunaan Estimasi dan *Judgment*

Karakteristik IFRS yang lebih *principle based* dibandingkan PSAK/ISAK terdahulu yang lebih *ruled based*, akan berdampak banyak dibutuhkan *judgment* untuk menentukan bagian suatu transaksi keuangan dicatat.

- b. Peningkatan penggunaan Nilai wajar (*fair Value*)

Penggunaan nilai wajar seperti untuk *property*, investasi, beberapa asset tak berwujud dan asset keuangan. Berbeda dengan sebelum digunakan IFRS akuntansi menggunakan *historical cost* untuk pengakuan transaksinya. Kelemahan dari *historical cost* kurang mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

c. Persyaratan pengungkapan yang lebih banya dan lebih rinci

IFRS mensyaratkan pengungkapan berbagai informasi tentang resiko kuantitatif maupun kualitatif. Pengungkapan dalam laporan keuangan harus sejalan dengan data atau informasi yang digunakan oleh manajemen.

## 5. Kualitas Audit

Kualitas laba juga akan dipengaruhi oleh pihak independen yang ikut dalam proses pelaporan keuangan perusahaan, yaitu auditor. Peran auditor independen adalah untuk menyediakan jasa verifikasi oleh pihak luar atas kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku. Peran auditing dalam proses pelaporan keuangan adalah untuk mendorong aplikasi standar akuntansi. Meskipun merupakan entitas yang terpisah dari perusahaan, namun penunjukkan auditor tetap berada di tangan manajemen. Manajemen tetap memiliki kendali terhadap auditor yang akan ditunjuk untuk melakukan audit atas laporan keuangan perusahaan (Wardhani, 2009).

ASOBAC (*A statement of Basic auditing Concepts*) dalam (Wardhani, 2009) mendefinisikan auditing sebagai suatu proses sistematis untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti secara obyektif mengenai asersi-aseri tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-aseri tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan dan menyampaikan hasilnya kepada para pemakai yang berkepentingan. De Angelo (1981) dalam (Rohaeni dan Aryati, 2011) mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem

akuntansi kliennya. Sedangkan (Wardhani, 2009) mendefinisikan kualitas audit sebagai penilaian pasar terhadap kemungkinan auditor akan menemukan suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi klien dan melaporkan pelanggaran tersebut. Secara umum audit adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan tentang kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan (Mulyadi, 2002) dalam (Putri, 2013).

Akuntan publik sebagai auditor eksternal yang relatif lebih independen dari manajemen dibandingkan auditor internal sejauh ini diharapkan dapat meminimalkan kasus rekayasa laba dan meningkatkan kredibilitas informasi akuntansi dalam laporan keuangan. Para pengguna laporan keuangan terutama para pemegang saham akan mengambil keputusan berdasarkan pada laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor. Auditor sebagai pihak yang independen diharapkan dapat membatasi besarnya manajemen laba serta membantu menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat umum terhadap laporan keuangan (Mulyadi, 2002) dalam (Putri, 2013).

Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) audit yang dilaksanakan auditor tersebut dapat berkualitas jika memenuhi ketentuan standar auditing. Standar auditing mencakup mutu profesional (*professional qualities*) auditor independen, pertimbangan (*judgment*) yang digunakan dalam

pelaksanaan audit dan penyusunan laporan auditor (IAI, 2001) dalam (Putri, 2013):

1. Standar Umum: Auditor harus memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang memadai, independensi dalam sikap mental dan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama.
2. Standar pelaksanaan pekerjaan lapangan: perencanaan dan supervisi audit, pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern, dan bukti audit yang cukup dan kompeten.
3. Standar pelaporan: pernyataan apakah laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, pernyataan mengenai ketidakkonsistensian penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum, pengungkapan informasi dalam laporan keuangan, dan pernyataan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan.

De Angelo (1981) dalam Wardhani (2009) mengemukakan bahwa kualitas audit meningkat dengan ukuran KAP karena KAP besar mempunyai kemampuan lebih untuk berspesialisasi dan berinovasi melalui teknologi. KAP besar lebih mampu untuk menemukan pelanggaran dalam sistem akuntansi perusahaan dibandingkan dengan KAP kecil. Sumberdaya dan keunggulan komparatif yang dimiliki oleh auditor besar, dalam deteksi dan koreksi kesalahan pelaporan keuangan perusahaan dapat dilakukan dengan lebih baik.

Pengaruh kualitas audit terhadap kualitas laba telah didokumentasikan oleh beberapa penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian sebelumnya menyatakan bahwa perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan publik yang

besar memiliki kualitas laba yang lebih baik (Becker *et.al.*, 1998; Teoh dan Wong, 1993) dalam Wardhani (2009). De Angelo (1981) dalam Samekto (2013) berargumentasi bahwa kualitas audit secara langsung berhubungan dengan ukuran dari perusahaan audit, dengan proksi untuk ukuran perusahaan audit adalah jumlah klien. Perusahaan audit yang besar adalah dengan jumlah klien yang lebih banyak. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perusahaan audit yang besar akan berusaha untuk menyajikan kualitas audit yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan audit yang kecil. Perusahaan audit yang besar, jika tidak memberikan kualitas audit yang tinggi akan kehilangan reputasinya, dan jika ini terjadi maka dia akan mengalami kerugian yang lebih besar dengan kehilangan klien.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menguji dampak kualitas audit terhadap tindakan *income smoothing*, sedangkan penelitian penggunaan variabel independen konvergensi IFRS, masih belum banyak yang melakukan penelitian dalam interaksi antara konvergensi IFRS dan kualitas audit dengan *income smoothing*.

Penelitian yang dilakukan Rohaeni dan Aryati (2011) di Negara Singapura, Cina dan Indonesia pada sektor manufaktur yang terdaftar di *database datastream* tahun 2006 sampai tahun 2010. Pengukuran variabel *income smoothing* menggunakan korelasai *Spearman*. Terbukti dengan konvergensi IFRS berpengaruh negatif terhadap tindakan *income smoothing*. Hubungan negatif ini terjadi karena penerapan IFRS akan berdampak pada

semakin sedikitnya pilihan metode-metode akuntansi yang dapat diterapkan sehingga akan meminimalisir praktik kecurangan akuntansi.

Qomariyah (2013) meneliti pengaruh konvergensi IFRS terhadap manajemen laba dengan struktur kepemilikan manajerial sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Discretionary accrual* dengan *Modified Jones* digunakan untuk menentukan praktik manajemen laba. Penelitian menggunakan 37 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, periode 2009-2012. Pengujian hipotesis menggunakan model analisis regresi berganda dan analisis regresi sederhana untuk menguji pengaruh dari konvergensi IFRS terhadap manajemen laba dengan struktur kepemilikan manajerial sebagai variabel moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konvergensi IFRS mempunyai pengaruh negatif terhadap tindakan manajemen laba.

Pradhana (2013) meneliti pengaruh kualitas audit terhadap *earnings management* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar dan *listing* di BEI periode 2008-2010. Hasil penelitian membuktikan bahwa pengaruh antara ukuran auditor dengan terjadinya *earnings managements* adalah *negative* tidak signifikan. Penelitian selanjutnya yang dilakukan Masrurroh (2010) untuk mengetahui pengaruh mekanisme *corporate governance* (yang terdiri dari kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen, *remuneration* dan keberadaan komite audit) dan kualitas audit terhadap *income smoothing*. Hasil pengujian dengan menggunakan regresi logistik menunjukkan kepemilikan manajerial, proporsi komisaris independen

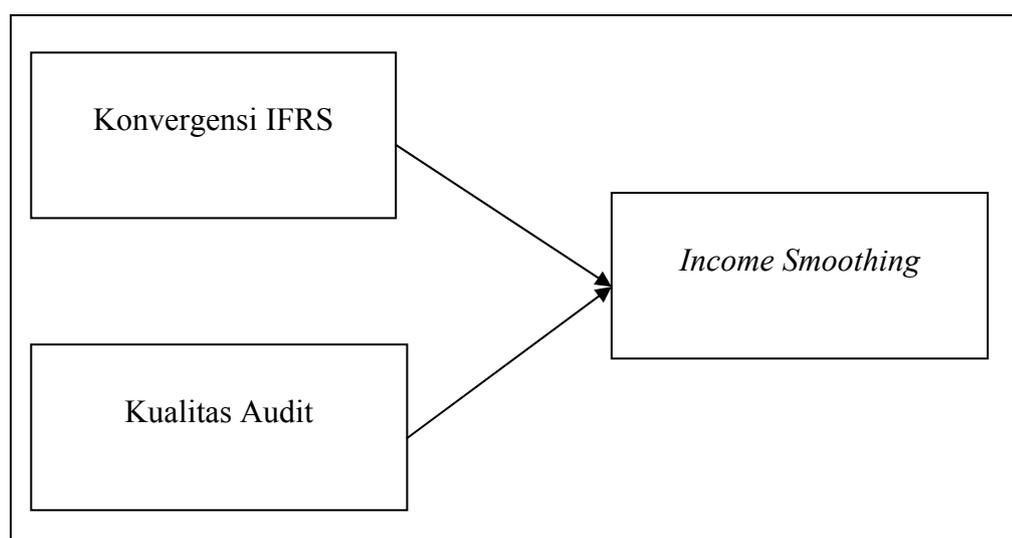
dan kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *income smoothing*. Sedangkan variabel kepemilikan institusional, *remuneration*, keberadaan komite audit, ukuran perusahaan, dan rasio profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *income smoothing*.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Wardhani (2009) yang menganalisis faktor determinan dari kualitas laba, baik faktor eksternal (yaitu proteksi bagi investor dan derajat konvergensi GAAP lokal dengan IFRS) maupun faktor internal (yaitu implementasi *corporate governance* dan kualitas audit). Penelitian dilakukan dalam lingkup negara-negara di Asia terdiri dari Hong Kong, India, Indonesia, Jepang, Korea, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, dan Thailand. Berdasarkan hasil pengujian, ditemukan bahwa proteksi bagi investor berpengaruh positif terhadap pembentukan standar akuntansi di suatu negara, kualitas implementasi *corporate governance* pada level perusahaan, dan kualitas audit. Penelitian ini juga membuktikan bahwa proteksi bagi investor, derajat konvergensi GAAP lokal dengan IFRS, implementasi *corporate governance*, dan kualitas audit secara umum berpengaruh positif terhadap kualitas laba.

### **C. Kerangka Berfikir**

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti hubungan atau pengaruh antara konvergensi IFRS dan kualitas audit terhadap *income smoothing*, konvergensi IFRS dan kualitas audit merupakan variabel independen yang dapat di golongkan kedalam X1, dan kualitas audit di golongkan ke dalam X2, konvergensi IFRS dan kualitas audit diasumsikan berpengaruh terhadap *income*

*smoothing* yang merupakan variabel dependen, untuk mendeteksi atau menghitung *income smoothing* yaitu dengan menggunakan Indeks *Eckel* (1981), adanya tindakan *income smoothing* ditunjukkan oleh indeks yang kurang dari satu (perata  $< 1$ ). Menurut Ashari (1994) dalam Idris (2014) Indeks *Eckel* dikembangkan secara spesifik sebagai pengukuran dikotomis dari perataan laba. Penggunaan indeks *Eckel* untuk mengetahui status perusahaan yang melakukan tindakan *income smoothing* dan yang tidak melakukan tindakan *Income smoothing* ini didasari alasan yang telah dikemukakan oleh (Ashari, 1994) yaitu: 1) obyektif dan berdasarkan pada statistik dengan pemisahan yang jelas antara perusahaan yang melakukan *income smoothing* dan yang tidak melakukan tindakan *income smoothing*, 2) mengukur terjadinya tindakan *income smoothing* tanpa memaksakan prediksi pendapatan, pembuatan model dari laba yang diharapkan, pengujian biaya atau pertimbangan yang subyektif. Berikut adalah kerangka pemikiran yang dapat digambarkan dalam bentuk diagram skematik.



Gambar 1

Sumber: Dikembangkan untuk penelitian ini

## **D. Perumusan Hipotesis**

### **1. Pengaruh Konvergensi IFRS terhadap *Income Smoothing***

PSAK No 55 memiliki peraturan yang ketat terkait reklasifikasi asset keuangan dari satu kategori ke kategori yang lainnya. Tujuan utama peraturan ini adalah untuk mencegah praktek manajemen laba melalui pemilihan jenis pengakuan atau menghindari pengakuan keuntungan atau kerugian dengan mengubah klasifikasi per asset keuangan dari satu kategori ke kategori yang lainnya. PSAK No 55 sebelum revisi 2011, mengizinkan reklasifikasi hanya untuk kategori aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo dan tersedia untuk dijual (Kartikahadi, 2012).

PSAK No 14 revisi 2008 mengenai Persediaan, dalam PSAK No 14 penggunaan metode LIFO telah dihilangkan. Penggunaan metode LIFO pada pelaporan keuangan sering disebabkan karena faktor pajak. Inflasi atau dalam keadaan tren harga barang tinggi, metode LIFO umumnya akan menghasilkan harga pokok penjualan yang lebih tinggi dan laba bersih yang lebih rendah dibandingkan metode lainnya, sehingga beban pajak perusahaan juga lebih rendah (Kartikahadi, 2012).

PSAK No 60 menyediakan pengungkapan dalam laporan keuangan untuk melengkapi pengguna laporan keuangan dengan tambahan informasi yang dapat mempengaruhi penilaian atas posisi keuangan, kinerja keuangan, waktu dan ketidakpastian arus kas dimasa depan. Penambahan pengungkapan untuk item-item yang mempengaruhi jumlah laba komprehensif, dimana keuntungan dan kerugian dipisahkan berdasarkan kategori instrumen keuangan,

dan pengungkapan nilai wajar untuk setiap kelas aset dan liabilitas keuangan, serta pengungkapan hirarki nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diukur dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan. Pengungkapan dalam laporan keuangan harus sejalan dengan data atau informasi yang dipakai untuk pengambilan keputusan yang diambil oleh manajemen. Tingkat pengungkapan yang mendekati pengungkapan penuh (*full disclosure*) akan mengurangi ketidakseimbangan informasi antara manajer dengan pihak pengguna laporan. Adanya asimetri informasi mendorong manajer akan melakukan *dysfunctional behavior* dengan manajemen laba. Beberapa penelitian membuktikan bahwa keberadaan asimetri informasi antara manajer dan pemegang saham adalah kondisi yang diperlukan untuk melakukan manajemen laba (Dye, dalam Rusmin, 2010).

*Income smoothing* merupakan bagian dari manajemen laba yang merupakan intervensi dari pihak manajemen untuk mengatur laba yaitu dengan meratakan laba akuntansi dengan memanfaatkan atau kelonggaran penggunaan metode dan prosedur akuntansi. Standar akuntansi memperbolehkan untuk memilih metode akuntansi (Cahyati, 2011). Scott (1997) dalam Lestari (2013) menyatakan bahwa manajemen laba adalah cara yang digunakan oleh manajer untuk mempengaruhi angka laba secara sistematis dan sengaja memilih kebijakan akuntansi dan prosedur akuntansi tertentu yang bertujuan untuk memaksimalkan utilitas manajer dan atau nilai pasar dari perusahaan.

Penelitian yang dilakukan (Rohaeni dan Aryati, 2011) di Negara Singapura, Cina dan Indonesia pada sektor manufaktur terbukti dengan

konvergensi IFRS berpengaruh negatif terhadap tindakan *income smoothing*. Argumentasi Ashbaugh dan Pincus (2001) dan Barth *et.al.*(2007) dalam (Wardhani, 2009) menyatakan bahwa dengan semakin konvergennya GAAP (*Generally Accepted Accounting Principles*) lokal suatu negara terhadap standar akuntansi internasional maka persyaratan pengungkapannya akan lebih banyak dan pilihan metode akuntansinya lebih terbatas sehingga kualitas akuntansi dapat diperbaiki dengan menghilangkan alternatif-alternatif metode akuntansi yang kurang dapat merefleksikan kinerja perusahaan yang dapat digunakan untuk pengelolaan laba. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis ke-1 yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

**H1: Konvergensi IFRS berpengaruh negatif terhadap *Income Smoothing***

## **2. Pengaruh Kualitas Audit terhadap *Income Smoothing***

Kualitas laba juga akan dipengaruhi oleh pihak independen yang ikut dalam proses pelaporan keuangan perusahaan, yaitu auditor. Auditor *big four* merupakan auditor yang memiliki keahlian dan reputasi yang tinggi dibanding dengan auditor *non big four*. Hal ini disebabkan auditor dalam kelompok KAP *big four* cenderung memiliki auditor yang lebih berpengalaman yang pada gilirannya memiliki kemampuan dalam membatasi besarnya *income smoothing* suatu perusahaan. Auditor tidak dapat mempertahankan reputasinya, maka akan menimbulkan skeptisisme masyarakat mengenai ketidakmampuan perilaku auditor dalam berhadapan dengan klien yang dipersepsikan gagal menjalankan peran sebagai auditor (Rusmin, 2010).

De Angelo (1981) dalam Wardhani (2009) mengemukakan bahwa kualitas audit meningkat dengan ukuran KAP karena KAP besar mempunyai kemampuan lebih untuk berspesialisasi dan berinovasi melalui teknologi. KAP besar lebih mampu untuk menemukan pelanggaran dalam sistem akuntansi perusahaan dibandingkan dengan KAP kecil. Sumberdaya dan keunggulan komparatif yang dimiliki oleh auditor besar, dalam deteksi dan koreksi kesalahan pelaporan keuangan perusahaan dapat dilakukan dengan lebih baik.

Studi Gerayli *et.al.* (2011) dalam Pradhana (2013) menyatakan bahwa ukuran auditor berhubungan negatif dengan manajemen laba diukur dengan *discretionary accrual*, hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang menggunakan auditor *big four* manajemen laba di perusahaan akan lebih rendah dibandingkan perusahaan yang di audit oleh auditor *non big four*. Analisis lebih lanjut mengungkapkan bahwa hubungan antara kualitas audit dengan manajemen laba hanya signifikan dalam perusahaan yang di audit oleh KAP *big four*.

Penelitian lainnya yang dilakukan (Masrurroh, 2010) untuk mengetahui pengaruh mekanisme *corporate governance* (yang terdiri dari kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen, *remuneration* dan keberadaan komite audit) dan kualitas audit terhadap *income smoothing*. Hasil pengujian dengan menggunakan regresi logistik menunjukkan kepemilikan manajerial, proporsi komisaris independen dan kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *income smoothing*. Sedangkan variabel kepemilikan institusional, *remuneration*, keberadaan komite audit,

ukuran perusahaan, dan rasio profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *income smoothing*. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis ke-2 yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

**H2: Kualitas audit dengan ukuran *KAP big four* berpengaruh negatif terhadap *income smoothing***